

Original Artikel

Tinjauan Penerapan SMK3 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012

(Review of Implementation of SMK3 Based on Government Regulation No. 50 of 2012)

Severinus Ama Kolot

STIKIM Jakarta, Indonesia

amakolots@gmail.com

Abstract

Introduction: Based on Government Regulation No. 50 of 2012, companies with more than 100 workers and have a high potential for hazards are required to implement an Occupational Safety and Health Management System (SMK3). The purpose of this study is to review the implementation of the occupational safety and health management system based on Government Regulation Number 50 of 2012 at PT Totalindo Eka Persada, the Kingland Avenue Serpong Project in 2020.

Methods: This research is descriptive using a qualitative approach. The informants of this study used 2 key informants, namely the HSE Manager and construction K3 experts. Research data information is obtained from interviews, documents, and observations.

Results: Based on Government Regulation Number 50 of 2012 obtained a suitability of 86.5%. The level of achievement in detail is, monitoring and evaluation of K3 performance at 75%, implementation of the K3 plan 78%, determining K3 policy 100%, and planning K3 100%.

Discussion: Total value of the five elements of Government Regulation Number 50 of 2012 in the kingland avenue project of PT. Totalindo Eka Persada in 2020 is 86.5% so that the implementation of the Occupational Health and Safety Management System (SMK3) is classified as satisfactory based on the provisions required by Government Regulation Number 50 of 2012.

Keywords: Occupational Health and Safety, Implementation of PP 50 2012, Management System.

Artikel

Disubmit (Received) :

Diterima (Accepted) :

Diterbitkan (Published) :

Copyright: © 2021 by the authors. License DPOAJ, Jakarta, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Pendahuluan

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat terlindungi dan bebas dari kecelakaan kerja pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja tidak hanya menimbulkan korban jiwa tetapi juga kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas. Keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya sangat penting dalam meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja namun jauh dari itu, keselamatan dan kesehatan kerja berdampak positif terhadap keberlangsungan produktivitas kerja. Oleh sebab itu, masalah keselamatan dan kesehatan kerja saat ini bukan hanya menjadi kewajiban yang harus diperhatikan oleh pekerja, tetapi harus dipenuhi oleh sebuah sistem kerja.¹

Menurut perkiraan *International Labour Organization* (ILO), di tingkat global lebih dari 2,78 juta orang meninggal dalam satu tahun yang disebabkan oleh kecelakaan kerja atau penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan. Selain itu terdapat sekitar 374 juta cedera dan penyakit akibat kecelakaan kerja non-fatal setiap tahun. Kecelakaan kerja di Inggris rata-rata 2 orang per harinya.² Kawasan Asia dan Pasifik lebih dari 1,8 juta kematian terkait pekerjaan terjadi setiap tahun, dan sekitar 2/3 kematian akibat kerja terjadi di Asia³.

Jumlah kecelakaan kerja di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 jumlah kecelakaan kerja sebanyak 103.235 kasus dan pada tahun 2015 meningkat mencapai angka 110.285. Akan tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan 4,6 % yakni sebanyak 102.182 kasus kecelakaan kerja. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan sebanyak 123.041 kasus dan tahun 2018 terjadi sebanyak 173.105 kasus kecelakaan kerja.⁴

Menurut data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten dalam 3 tahun terakhir, jumlah kasus kecelakaan kerja berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 2017 berjumlah 29 kasus, tahun 2018 berjumlah 54 kasus, tahun 2019 berjumlah 54 kasus. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap tahun cenderung mengalami kenaikan dan masih tingginya kejadian kecelakaan kerja di Banten.⁵

Berdasarkan data di PT. Totalindo Proyek Kingland Avenue Serpong diketahui bahwa adanya kenaikan dalam kecelakaan kerja dalam 3 tahun terakhir. Hal ini dapat terlihat pada tahun 2017 sebesar 23 kasus yang mengalami kecelakaan kerja, pada tahun 2018 sebesar 25 kasus yang mengalami kecelakaan kerja, lalu pada tahun 2019 sebesar kenaikan yang cukup pesat yaitu 37 orang yang mengalami kecelakaan kerja.⁶

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dilaksanakan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3. Kebijakan nasional tentang SMK3 digunakan sebagai acuan perusahaan dalam menerapkan SMK3. Penerapan SMK3 terdiri dari penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan peninjauan dan peningkatan kinerja K3.⁷

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi seberapa besar tingkat konsistensi PT. Totalindo Eka Persada (Proyek Kingland Avenue) Serpong pada tahun 2020 terhadap penerapan SMK3 berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012.

Metode

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud untuk melakukan tinjauan penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3) pada PT Totalindo Eka Persada Proyek Kingland Avenue Serpong Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan dengan cara telaah dokumen dan observasi.

Teknik sampling yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel dengan cara mempertimbangkan penelitian berdasarkan kebutuhan peneliti.⁸ Pengumpulan data di lokasi penelitian dikumpulkan sampai dianggap cukup untuk membuat gambaran maksimal yang dibutuhkan. Ukuran kecukupan tersebut ditunjukkan oleh adanya “*split over of information*” artinya pertanyaan yang sama diulang dan memperoleh jawaban

yang sama pula.⁹ Informan dalam penelitian ini terdiri dari 2 orang informan kunci. Informan tersebut adalah HSE Manager dan ahli K3 kontruksi pada proyek Kingland Avenue yang dianggap mampu dan menguasai SMK3 serta implementasinya dilapangan.

Adapun sumber data yang digunakan peneliti adalah :

1. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, dengan cara melakukan observasi studi pendahuluan dan penelitian dengan melakukan wawancara mendalam terhadap informan di PT. Totalindo Eka Persada Proyek Kingland Avenue Serpong.
2. Data sekunder adalah data yang didapatkan peneliti dari sumber yang telah ada. Data ini untuk memperkuat teori dan melengkapi informasi yang telah dilakukan.

Setelah mendapatkan sumber data langkah selanjutnya penelliti melakukan teknik dan analisa data dimana teknik penyajian data dilakukan secara sederhana dan jelas agar orang lain dapat memahami apa yang disajikan dengan mudah. Sementara analisa data dilakukan dengan membuat transkrip hasil wawancara yang kemudian dibuat reduksi data.

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data.

Triangulasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber dilakukan melalui wawancara mendalam.
2. Triangulasi teknik diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dan dokumentasi.

Hasil

Tabel 1. Rangkuman Hasil Data Mengenai Tinjauan Penerapan SMK3 Berdasarkan PP 50 Tahun 2012 di Proyek Kingland Aven

Aspek pemantauan pemeriksaan	Skor yang diharapkan	Hasil ukur	persentase
Penetapan Kebijakan K3	5	5	100%
Perencanaan K3	12	12	100%
Pelaksanaan Rencana K3	18	14	78 %
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3	8	6	75 %
Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3	9	8	89 %
Total nilai elemen PP 50 tahun 2012	52	45	86,5 %

Pembahasan

Tinjauan Penerapan SMK3 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 di PT Totalindo Eka Persada (Proyek Kingland Avenue) Serpong

A. Penetapan Kebijakan K3

Berdasarkan hasil penelitian di PT Totalindo (Proyek Kingland Avenue) Serpong, tentang penetapan kebijakan K3 dapat diklasifikasikan sudah sesuai, dimana perusahaan sudah menyusun dan menetapkan suatu kebijakan khusus yang berkaitan dengan K3. Manajemen puncak sebagai pemegang kekuasaan ikut serta dalam penyusunan kebijakan tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan penandatanganan persetujuan kebijakan oleh direktur dan manajemen puncak yang lain sebelum kebijakan puncak itu disebar kebijakan itu di terbitkan dan di publikasikan.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan dua informan yaitu :

P : Apakah ada kebijakan K3 yang tertulis, tertanggal, ditandatangani oleh pucuk pimpinan perusahaan yang secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3?

R : Dibuat dan ada. Ditahun 2021 kita sudah buat. Di PT Totalindo sendiri ada 2 jenis kebijakan yaitu kebijakan umum yang dibuat oleh kantor pusat dan kebijakan khusus yang dibuat oleh proyek masing-masing berdasarkan kebijakan owner dari masing-masing proyek. Kebijakan tersebut secara tertulis, tertanggal, dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan. (Informan HSE Manajer).

R : Kebijakan yang ada sudah kita sebarkan ke ruang rapat, papan pengumuman, kontraktor, dan juga di pasang di pos sehingga jika ada tamu yang datang bisa di baca.(Informan ahli K3 kontruksi)

B. Perencanaan K3

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perencanaan K3 di proyek Kingland Avenue didapatkan hasil bahwa perusahaan sudah melakukan perencanaan K3 yang meliputi melakukan telaah kondisi awal k3 perusahaan yang termuat dalam HSE Plan dalam perusahaan dan melakukan identifikasi potensi bahaya dan pengendalian resiko yang termuat dalam hirarch.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan dua informan yaitu :

P : Apakah dalam menyusun rencana K3, perusahaan melakukan penelaahan atau tinjauan awal kondisi K3 perusahaan?

R : Benar. Di kontrak kerja bersama owner ada namanya HSE Plan. Di HSE plan itu sebelum kita kerja sudah mulai perencanaan diuraikan termasuk anggaran, termasuk aplikasi dilapangan apakah sesuai dengan HSE Plan yang direncanakan atau tidak. Dan setiap dokumen kontrak kita lampirkan HSE plan. (Informan HSE Manajer).

R : Ya sudah pasti karena timbulnya dari biaya pasti ada hirarch, dan hirarch itu tercantuk apa saja yang dibutuhkan disana. Hirach ditinjau setahun sekali. (Informan ahli K3 kontruksi)

Hendri (2012), dalam penelitian yang dilakukan di perusahaan GOKPL membuktikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan rencana K3 yang sudah diterapkan berjalan dengan baik dan sangat efektif dalam mengurangi angka kecelakaan kerja khususnya pada kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi.¹⁰

C. Pelaksanaan Rencana K3

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan rencana K3 di proyek Klingland Avenue, didapatkan informasi bahwa perusahaan telah melaksanakan rencana K3 sudah cukup baik. Namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti peninjauan intruksi kerja secara berkala yang masih bergantung pada kantor pusat, minimnya pendidikan pekerja, P2K3 yang hanya tersedia di kantor pusat, dan penyaluran anggaran yang belum lancar oleh perusahaan.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan dua informan yaitu :

P : Apakah sumber daya manusia sudah terpenuhi baik kualitas maupun kuantitas?

R : Berkaitan dengan kualitas kita namanya proyek kontruksimemiliki kelemahan yaitu rata-rata riwayat pendidikan pekerja maksimal tamatan SMA, ada juga yang tidak tamat SD. Tapi dari segi kuantitas kita cukup bagus. (Informan HSE Manajer).

R : Soal jumlah kita sudah memenuhi akan tetapi soal kualitas kita masih kurang karena tingkat pendidikan pekerja yang rendah. (Informan ahli K3 konstruksi)

P : Apakah terdapat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) pada perusahaan ?

R : Ada dan bertempat di kantor pusat dan setiap 3 bulan sekali kita buat laporan ke P2K3. (Informan HSE Manajer).

R : Kita adanya di kantor pusat. Kalau disini belum ada.(Informan ahli K3 konstruksi).

Dalam penelitian Windiana pada tahun 2010 diketahui bahwa salah satu faktor yang dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan SMK3 adalah kesadaran pekerja akan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), meskipun alat pelindung diri tersebut sudah disediakan oleh PT. Goodyear Indonesia, Tbk. sudah cukup lengkap bagi karyawannya, namun pelaksanaan dalam penggunaan APD tersebut masih kurang baik.

D. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3

Berdasarkan hasil penelitain mengenai pemantauan dan evaluasi kinerja K3 diketahui bahwa pada proyek Kingland Avenue telah menetapkan prosedurnya melalui evaluasi kinerja yang dilakukan oleh petugas yang memiliki keahlian yang cukup, rekomendasi untuk tindakan perbaikan apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap persyaratan K3, dan penyelidikan dilaksanakan secara memadai sehingga dapat menemukan penyebab dari suatu insiden.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan dua informan yaitu :

P : Apakah evaluasi kinerja dilakukan oleh petugas yang memiliki keahlian yang cukup ?

R : Kita disemua staf Totalindo saya yakin orangnya memiliki kompetensi tertentu dan saya yakin mereka mampu untuk memenuhi persyaratan yang dimaksud. (Informan HSE Manajer).

R : Semua staf kita memiliki keahlian yang cukup dibidangnya masing-masing. (Informan ahli K3 konstruksi).

P : Apakah evaluasi kinerja dilakukan dengan peralatan dan metode pengujian yang memadai sesuai dengan standar K3 yang berlaku ?

R : Ya kalau dilapangan seperti itu. Jadi alat-alat yang sudah ada dipastikan aman, nyaman, dan mudah dipakai. Jadi itu ada tim baik dari tim mekanik bekerja sama dengan tim dari safety misalnya Tower Crane yang inspeksi orang dari mekanik karena yang tau alat adalah mekanik. Tetapi keselamatan yang berhubungan dengan k3, di ikut sertakan juga orang k3nya. Selain itu juga pada saat belanja kebutuhan atau barang proyek, tenaga k3 juga diikutsertakan sehingga mencegah pembelian barang yang tidak sesuai dengan syarat keselamatan. (Informan HSE Manajer).

R : Belum terlalu memadai.(Informan ahli K3 konstruksi).

Susihono (2013), dari hasil penelitian yang dilakukannya dikatakan bahwa pemantauan lebih maksimal terhadap penerapan SMK3 yaitu dengan menerapkan *reward* terhadap karyawan yang disiplin dan *punishment* terhadap karyawan yang dianggap lalai. Dengan demikian dapat meningkatkan kepedulian karyawan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Peraturan yang lebih ketat terhadap karyawan yang melanggar aturan dari penerapan SMK3 seperti penggunaan APD dan bertindak serta bekerja dengan peduli keselamatan dan kesehatan bukan karena *unsafe behaviour*.¹¹

E. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan dan peniggkatan kinerja SMK3 pada proyek Kingland Avenue telah melakukan tinjauan dan peningkatan kinerja SMK3 yaitu melalui kegiatan peninjauan secara berkala, meningkatkan kinerja K3 berdasarkan perubahan peraturan perundang-undangan, penyesuaian terhadap tuntutan pasar, tinjauan berdasarkan produk dan kegiatan perusahaan, tinjauan mengacu pada adanya pelaporan dari pihak lain.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan dua informan yaitu :

P : Apakah perusahaan melakukan peninjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara berkala?

R : Ya. Setiap 6 bulan sekali. Setiap 3 tahun diaudit ulang untuk mengetahui apakah perusahaan masih layak memperoleh bendera emas atau tidak. (Informan HSE Manajer).

R : Ada namanya Plan Do Cek Action (PDCA). Di review 3 bulan

sekali, 6 bulan sekali, dan setahun sekali. Setiap apa yang terjadi dilapangan kita sampaikan di rapat P2K3 itu. (Informan ahli K3 konstruksi).

Imaculata (2013) dari hasil penelitiannya terlihat bahwa dalam peninjauan ulang PT. Cakra Buana Megah telah melakukan evaluasi bidang keselamatan dan kesehatan kerja secara berkala. Tinjauan ulang terhadap program SMK3 dilakukan secara rutin oleh PT Cakra Buana Megah dan mendokumentasikannya ke dalam laporan perusahaan kepada semua tenaga kerja ketika sedang bekerja dan pada saat menggunakan alat kerja. Hal ini dilakukan agar dapat mencegah dan mengurangi potensi bahaya yang dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan dan peniggkatan kinerja SMK3 pada proyek Kingland Avenue telah melakukan tinjauan dan peningkatan kinerja SMK3 yaitu melalui kegiatan peninjauan secara berkala, meningkatkan kinerja K3 berdasarkan perubahan peraturan perundang-undangan, penyesuaian terhadap tuntutan pasar, tinjauan berdasarkan produk dan kegiatan perusahaan, tinjauan mengacu pada adanya pelaporan dari pihak lain.

References

1. Irzal. Dasar-dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja;2016.
2. Buckley,P. Work related Stress, Anxiety and Depression Statistics in Great Britain 2016. In Health and Safety Executive;2016.
3. International Labour Office. World Employment Social Outlook: Trends for Women 2018 Global snapshot. In International Labor Organization;2018.
4. BPJS Ketenagakerjaan. Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2018. In BPJS Ketenagakerjaan; 2018.
5. Disnakertrans. Kejadian kecelakaan kerja provinsi Banten;2019.
6. PT. Totalindo. Totalindo Proyek Kingland Avenue Serpong;2019.
7. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;2012.
8. Herdiansyah,H. Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif. PT. Rajadrafindo Persada;2015.

9. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta;2013.
10. Hendri. Analisa Tingkat Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dn Kesehatan Kerja Perusahaan GOKPL dalam Menekan Angka Kecelakaan dalam Kegiatan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi. Universitas Indonesia;2012.
11. Susihono, Wahyu dan Akbar Rini, Feni. “ Penerapan Sistem Manajemen K3 dan Identifikasi Potensi Bahaya”. Jurnal Ilmiah Pengetahuan & penerapan teknik industri. Vol. 2. No.2;2013.

--- ISJHS ---